

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia merupakan implementasi dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan perikemanusiaan dan perikeadilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga

mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Dari hal ini itulah mulailah Indonesia melakukan sebuah pembangunan atau penanggulangan kemiskinan yang dimana bukan hanya pembangunan ekonomi melainkan banyak hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dengan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan masyarakat) pembangunan yang terdistorsi telah menyebabkan timbulnya masalah sosial yang demikian serius, seperti kemiskinan, disharmoni keluarga, tindak kekerasan, kerawanan social ekonomi, ketidakadilan terhadap perempuan, dan meningkatnya pengangguran. Masalah-masalah social tersebut dapat melahirkan dehumanisasi dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Lebih lanjut, semua masalah social tersebut telah menjadi hambatan utama bagi pembangunan ekonomi dan social.

Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relative tertinggal pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karen itu, salah satu indicator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam

menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Saktyanu, 2003).

Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Kemiskinan merupakan penyakit yang muncul saat masyarakat selalu mempunyai kekurangan secara material maupun non material seperti kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi, dan kekurangan-kekurangan lainnya yang menggambarkan kemiskinan. Faktor lain yang sangat nyata tentang kemiskinan terutama di kota-kota besar Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari pemukimannya, ribuan pekerja berunjuk rasa memprotes ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sikap dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri. Kemudian ketidakadilan sosial ekonomi, selain oleh beragam alasan juga disebabkan oleh praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak sehat.

Masalah kemiskinan dalam suatu negara biasanya sering dikaitkan dengan percepatan pertumbuhan. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa

pertumbuhan yang cepat dapat berakibat buruk bagi kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan yang sudah modern. Disamping itu ada beberapa pendapat kalangan pembuat kebijakan, bahwa dengan adanya pengeluaran publik yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan akan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan.

Salah satu ciri negara miskin adalah keinginan untuk menanamkan modal rendah. Hal ini lebih disebabkan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Di samping itu, pendapatan masyarakat juga rendah yang diakibatkan produktivitas mereka rendah. Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah PNPM Mandiri Perkotaan. Dulu program ini bernama P2KP dan berganti nama menjadi PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2008. Penganggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya.

Kemiskinan kota sebagai bagian dari kemiskinan nasional di Indonesia juga menjadi masalah yang cukup akut untuk ditangani. Sebagai warisan dan historis yang sudah berabad-abad, sejak munculnya kota itu sendiri, kaum papa perkotaan menjadi sebuah fenomena masalah sosial yang memprihatinkan, dengan tingkat penanggulangan yang lebih memprihatinkan, seolah-olah kemiskinan itu sendiri bersifat abadi, lestari dan tidak bisa dirubah lewat aksi maupun reformasi apapun. Kota-kota di Indonesia yang sekilas kelihatan sebagai simbol kemajuan dan budaya yang lebih maju dan seharusnya demikian, ternyata masih dipenuhi oleh problem kemiskinan dengan segala masalah sosial yang disebabkan atau berdampingan dengan masalah sosial lainnya. Dilihat dari

tingkat kesejahteraan masyarakat, sebagai Ibukota Propinsi Jawa Timur menghadapi persoalan yang cukup kompleks berkenaan dengan kemiskinan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penduduk miskin Jawa Timur lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Permasalahan kemiskinan di Jawa Timur jelas tidak hanya menjadi milik perdesaan (petani, buruh tani, buruh nelayan, dan sebagainya) tetapi juga merupakan masalah perkotaan. Mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di perdesaan.

Kabupaten Jombang telah melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan sejak namanya masih P2KP sejak tahun 1999. Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, hanya 18 Kecamatan Jombang yang menjadi lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2007. Kecamatan di Jombang yang telah melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan sejak awal berdirinya yaitu tahun 2007.

Daerah penelitian ini adalah salah satu Desa Kedungpari di Kecamatan Mojowarno yang memiliki jumlah kelurahan miskin paling besar. Menurut salah satu pengelola PNPM Mandiri di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno, Pak kades dan pengelola PNPM Desa Kedungpari (wawancara di kantor desa dan rumah pengelola BKM kedungpari) desa yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Desa Kedungpari. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.1
Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera
Menurut Klasifikasi BKKBN

Desa / Kelurahan	Tahun/Jiwa			
	2008	2009	2010	2011
Kedungpari	1,276	1,346	1,378	1,424
Karanglo	1,380	1,470	1,480	1,493
Latsari	1,210	1,350	1,350	1,262
Mojowarno	1,329	1,520	1,520	1,432
Penggaron	1,425	1,520	1,520	1,460
Mojoduwur	1,389	1,499	1,499	1,430
Mojowargi	8,92	9,92	9,92	9,62
Gondek	1,257	1,356	1,356	1,344
Gedangan	1,270	1,360	1,360	1,429
Mojojeje	1,125	1.325	1.325	1.264
Japanan	1,477	1.587	1.587	1.604
Grobogan	1,522	1.522	1.522	1.461
Rejoslamet	1,403	1.404	1.404	1.191
Selorejo	9,05	1005	1005	1.498
Menganto	1,392	1.412	1.412	1.569
Sukomulyo	7,28	738	738	789
CatakGayam	1,951	2.051	2.051	2.132
Wringinpitu	1,144	1.234	1.234	1.363
Sidokerto	1,494	1.544	1.544	1.569

Sumber: BPS Jombang 2008-2011

Tingkat kemiskinan di desa merupakan tingkat kemiskinan agregat dari nomor 4 dari Kecamatan Mojowarno. Tingkat kemiskinan dari Kecamatan Mojowarno masih tidak merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinan masih tinggi. Untuk itu perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan diseluruh Kabupaten Jombang, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi tiap kabupaten dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia pada Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur.

Dinamikan penurunan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari seluruh rangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh semua unsur pelaku ekonomi pada semua strata dan Kabupaten yang ada di Kecamatan Mojowarno desa Kedungpari dan hal itu juga adanya berbagai macam factor-faktor yang mempengaruhi adanya penurunan jumlah kemiskinan di Kabupaten Jombang yang ada di Kecamatan Mojowarno desa Kedungpari. Artinya fenomena-fenomena yang seperti halnya terjadi pada tingkatan Kecamatan Mojowarno, dalam skala yang lebih rendah dapat saja terjadi di beberapa Kabupaten Jombang Kecamatan Mojowarno Desa Kedungpari atau

mungkin juga terjadi untuk beberapa Kecamatan/Desa tertentu yang ada di Kecamatan Mojowarno.

Dari uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT PEMBERDAYAAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN JOMBANG”** (Kasus Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi warga miskin terhadap program PNPM Mandiri Perkotaan?
2. Apakah ada perbedaan warga miskin sebelum dan sesudah adanya program PNPM Mandiri Perkotaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Persepsi warga miskin terhadap program PNPM Mandiri Perkotaan.
2. Perbedaan warga miskin sebelum dan sesudah adanya PNPM Mandiri Perkotaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dihadapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai wacana untuk menambah wawasan serta sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan.

2. Bagi pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat dan menentukan kebijakan yang tepat di masa depan.

3. Bagi peneliti lain

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang kemiskinan di Kabupaten Jombang Kecamatan Mojowarno Desa Kedungpari.

1.5 Sistematika penelitian

Sistematika Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bab I: Bab ini memuat secara garis besar hal-hal yang mengantar pada pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi.
2. Bab II: Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan (PNMP Mandiri Perkotaan), selain itu juga terdapat kerangka pemikiran dari skripsi ini.
3. Bab III: Bab ini menguraikan metode penelitian meliputi definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.
4. BAB IV: Bab ini menguraikan hasil dan analisis yang terdiri dari deskripsi objek penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian Kabupaten Jombang Kecamatan Mojowarno Desa Kedungpari.
5. BAB V: Bab ini menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian.

